



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PT PELINDO JASA MARITIM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TUBAGUS PATRICK TRIBUDI UTAMA ISKANDAR
2. Jabatan : SEKRETARIS PERUSAHAAN
3. NHK : 656217

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.855.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 3.360.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 11000 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, WARISAN Rp. 345.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 984.000.000

1. MOTOR, KAISAR RUBY 250 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI F5418 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO URBANITE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VOXY 2.0 CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 43.914.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 4.882.914.000

**III. HUTANG**

Rp. 2.243.233.628

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.639.680.372



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.